

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alma Evelinda Silalahi, *Filsafat Hukum Pancasila*. Jakarta: Kreasi Cendekia Pustaka, 2020.

Arief Sabaruddin, *Sejarah Kebijakan Perumahan di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Erlangga, 2023.

Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep Target dan Strategi Implementasi*. Bandung: UNPAD Press, 2018.

Agustinus W. Dewantara, *Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong (Indonesia dalam Kacamata Soekarno)*. Yogyakarta : Penerbit PT Kanisius, 2017.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.

Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*. Bandar Lampung: FH UNILA, 1996.

Charles Darwin, *The Origin of Species*. Yogyakarta : Penerbit NARASI, 2022.

- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2014.
- Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016.
- Friedrich Engels, *The Origin of the Family, Private Property, and the State*. Jakarta : Pustaka Feminis, 2013.
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*. Bandung : Nusa Media, 2019.
- Ifdhal Kasim dan Johanes da Masenuss Arus, *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Esai Esai Pilihan*, Buku 2. Jakarta: ELSAM, 2001.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Komentar Umum ICCPR dan ICESR*. Jakarta: Komnas HAM, 2009.
- Komnas HAM RI, *Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak*. Jakarta : Komnas HAM RI, 2022.
- Luthfi J. Kurniawan, Abdussalam, dan Masduki. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Laboratorium Pancasila IKIP Malang, *Pokok-Pokok Pembahasan Pancasila: Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional, 1979.
- Laporan Profil Perumahan di Indonesia 2021*. Jakarta: Tim Housing and Real Estate Information System Kementerian PUPR, 2021.

- Manfred Nowak, *Introduction to The Internasional Human Rights Regime*.
Leiden: Nijhoff Publisher, 2003.
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta:
Rajawali Press, 2010.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap perbuatan Pemerintah dan Peradilan
Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Osgar S. Matopo, Muliadi dan Andi Nurul I.S, *Hukum Hak Asasi Manusia*.
Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Tim
Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum
Nasional Kemenkumham, 2011.
- RM.A.B.Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan
Penerbit Universitas Indonesia, 2004.
- Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik
Indonesia, 1995.
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, 2022.
- RM.A.B.Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan
Penerbit Universitas Indonesia, 2004), 8.
- Sigit S. Nugroho dan Sarbini, *Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam
Bingkai Pancasila*. Klaten: Lakeisha, 2023.

Sayidiman Suryohadiprojo, *Budaya Gotong Royong dan Masa Depan Bangsa*.

Jakarta : Kompas Penerbit Buku, 2016.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.

United Nations, *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Jakarta: Koalisi Perempuan Indonesia, 2016.

World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*. (Oxford: Oxford University Press, 1987.

Yusrizal Firdaus, *Pancasila sebagai Ideologi dan Falsafah Hukum Bangsa Indonesia*. Jakarta: Kreasi Cendekia Pustaka, 2020.

Yuval Noah Harari, *Sapiens*. Tangerang : Pustaka Alvabet, 2017.

Yudi Latif, *Reaktualisasi Pancasila*. Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
2. Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
3. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Nomor XVIII/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
10. Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

16. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
19. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
20. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2021 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembubaran Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2023 tentang Bantuan Biaya Administrasi Pembiayaan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
25. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat).
26. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 411/KPTS/M/2021 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batas Luas Lantai Rumah dan Rumah Swadaya
27. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 995/KPTS/M/2021 tentang Batasan Penghasilan Tertentu, Suku Bunga/Margin Pembiayaan Bersubsidi, Masa Subsidi, Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Luas Tanah, Batasan Luas Lantai, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, dan Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka.
28. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/KPTS/M/2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan
29. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan

30. Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kepesertaan dan Simpanan Tabungan Perumahan Rakyat
31. Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat
32. Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Perumahan bagi Peserta Tabungan Perumahan Rakyat
33. Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Perumahan bagi Peserta Tabungan Perumahan Rakyat
34. Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Perumahan bagi Peserta Tabungan Perumahan Rakyat
35. Keputusan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Batasan Kelompok Penghasilan, Suku Bunga, Margin, atau *Ujrah*, Jangka Waktu, Zona Wilayah, Limit/Kredit/Pembiayaan, Batasan Luas Lantai dan Luas Tanah, Pembobotan dan *Skoring* Urutan Prioritas, dan Batasan Biaya

36. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-X/2012 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

C. Jurnal

Assar Lindebeck, "*The Welfare State – Bacground, Achievements, Problems*"
Research Intitute Of Industrial Economics, No. 662 (2006)

Dynna D. Puspita, Andi & Romy Hermawan, "*Divergence in Implementation of Public Housing Saving Program: A Comparative Analysis of Indonesia, Singapore an d Japan*" *BIRCI Journal*, (2022), DOI:

<https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.4679>

E.P. Hennock, "*International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*," *Science Direct*, (2002), <https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/02724-8>.

Elviandri, Khuzdaifah Dimyati & Absori "*Quo Vadis negara kesejahteraan: Meneguhkan ideologi Welfare State negara hukum kesejahteraan indonesia*" *Jurnal Universitas Gadjah Mada*, (2019),
<http://dx.doi.org/10.22146/jmh.32986>

Nabila Haviazzahra "*Analisis Hukum Kepesertaan Pekerja Mandiri dalam Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat*"
Jurnal Hukum, (2024), DOI: <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.386>

D. Internet

Aisyah sekar ayu maharani & hilda b alexander,”80 Persen Rumah Subsidi Kosong,

Banyak yang Dipindahtangankan”, Kompas, 2 September, 2024

BM Lukita Grahadyarini, “Pemenuhan Kebutuhan Rumah Semakin Terimpit,”

Kompas, 2 Februari, 2024

BP Tapera, “Fokus Pada Penyediaan Pembiayaan Perumahan Pemerintah Hadir

Melalui BP TAPERA” *BP Tapera*, 4 Oktober 2024.

Internasional Bill of Human Rights A brief history, and the two Internasional

Convenant,

<https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights/international-bill-human-rights>.

Kata data, “Rumah untuk Semua, Problematika Rumah Masyarakat Berpenghasilan

Rendah”, Kata data Insight Center, Agustus 2022.

Kemenkeu, “Peranan APBN dalam Mengatasi Backlog Perumahan Bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), 2016,”, Direktorat Jenderal

Anggaran Kementerian Keuangan

M.puteri rosalina, “Jakarta dan Urban Sprawls,” Kompas, 24 Juni, 2019.

M. Ramyakim, “BP Tapera, KSEI, dan BRI Teken Perjanjian Kerja Sama Dana

Tapera Siap Dikelola Secara Kredibel,” Ksei.co.id, 10 Juni 2021.

Nabila Azmi, “Kredit Pemilikan Rumah Bank BP2BT,” BTN Properti, 31 Mei,

2022.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat

(Jakarta: DPR RI, 2015)

Panangian Simanungkalit “Mengatasi 12,7 juta “backlog” Perumahan kesenjangan

hunian masih terbentang lebar,” Kompas, 25 Agustus, 2023.

Ridhwan Mustajab, "Generasi Milenial Indonesia Paling Banyak Belum Punya Rumah." Data Indonesia, 10 Agustus, 2023.

Risalah Sidang Perkara Nomor 86,96 & 134/ PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Reoublik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,2024)

Ridhwan Mustajab, "Generasi Milenial Indonesia Paling Banyak Belum Punya Rumah." Data Indonesia, 10 Agustus, 2023.

Yohanes Advent Krisdamarjati "Jajak Pendapat Litbang Kompas: Resistensi Publik terhadap Tapera Terbilang Tinggi," Kompas, 11 Juni, 2024